

UPAYA BADAN KESBANGPOL KOTA BANDUNG DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA

Muhamad Abdul Aziz¹, Vania Widhia Insan², Dyan Ayu Lestari³, Kemala Dwi Rosa⁴, Ilham Nur Prasetyo⁵, Rifki Hidayat Fauzan⁶, Faiz Ubaidillah Achmad⁷, Muhammad Ali Taufan⁸

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email : muhammadabdulaziz2900@gmail.com¹ vaniawidhiainsan@gmail.com² dyanayulstr01@gmail.com³ kemaladwirosa@gmail.com⁴ ilhamnr419@gmail.com⁵ rifkihidayat1024@gmail.com⁶ faizubaidillahachmad@gmail.com⁷ putraparama4@gmail.com⁸

Abstrak

Partisipasi Politik Masyarakat Bandung pada Pilkada 2019 cukup meningkat secara signifikan. Pada Pemilu 2014 lalu angka partisipasi masyarakat Kota Bandung sebesar 77,6 persen. Sementara pada tahun ini meningkat menjadi 86,5 persen. Peningkatan Partisipasi Politik ini tentunya dipengaruhi berbagai aspek, baik itu sosialisasi yang dilakukan berbagai lembaga maupun sosialisasi informal yang berkaitan erat dengan informasi di media sosial. Tentunya para pemilih pemula juga berperan dalam peningkatan angka partisipasi politik Kota Bandung dalam pemilu 2019, kami mendapat data dari Kesbangpol Kota Bandung, bahwa di tahun ini ada penambahan sebesar 2.459 pemilih Pemula di Kota Bandung yang disiarkan dalam berita acara yang dikeluarkan KPU Kota Bandung. Tujuan Penelitian ini untuk Mengetahui sejauh mana upaya Kesbangpol dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih pemula di Kota Bandung, serta mengukur sejauh mana ketercapaian hasil program dari Kesbangpol Kota Bandung dalam menyelenggarakan Pendidikan Politik Kesbangpol Kota Bandung bagi pemilih pemula. Penelitian ini dilakukan pada Senin, 28 Maret 2022 di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan subjek penelitian. Hasil penelitian di analisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dimana peneliti mencoba menggambarkan, menguraikan, serta menginterpretasikan data yang sudah terkumpul sampai mampu memperoleh gambaran secara general dan komprehensif. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa, Pelaksanaan program kerja pendidikan politik yang seharusnya berjalan pada tahun 2020 - 2021 tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dampak dari adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan segala rencana dan anggaran di alihkan kepada penanganan covid-19. Sehingga dampak dari re-focusing anggaran ini mengakibatkan berbagai program tidak berjalan semestinya.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, program, re-focusing

Abstract

The political participation of the bandung people in the 2019 election was significant. In the 2014 election, 77.6 percent of the citizen participation rate of bandung was raised. As of this year it grew to 86.5 percent. This increased political engagement must have been influenced by various aspects, whether it was socializing institutions or informal socialization closely related to information on social media. Of course, the new electoral votes for bandung increased in political participation in the 2019 elections, we got a file from bandung's kesbangpol, which shows an increase of 2,459 for bandung voters in the country. The purpose of the study is to find out the extent to which kesbangpol efforts in carrying out political education for inner city voters, and to measure the extent of the program's success in conducting the political education kesbangpol for those of bandung. The study was done on Monday, March 28, 2022, at the office of the national and political entities of bandung. Research is conducted by way of observation, interview and study of documentation with the research subject. Research results are analyzed by researchers using qualitative descriptive techniques, in which researchers try to describe, expound, and interpret the data already collected until they are able to achieve a general and comprehensive picture. From research's hasil reveal that the implementation of a political educational work program that should have been carried out

by 2020-2021 could not have been carried out properly because of the covid-19 pandemic that was causing all plans and budgets to be transferred to the covid-19 treatment. And so the impact of re-budget reductions would result in programs not running properly.

Keywords: *political education, programs, re-focusing*



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor : 295 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung (Pemerintahan Kota Bandung, 2013), maka KESBANGPOL Kota Bandung memiliki tugas pokok membantu Walikota Bandung dalam melaksanakan urusan wajib Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas pokok, KESBANGPOL Kota Bandung mempunyai Fungsi: 1)Merumuskan kebijakan strategis; 2)Pembinaan, monitoring, evaluasi & laporan kegiatan; 3)Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.

KESBANGPOL Kota Bandung memiliki salah satu program dan kegiatan yaitu Pendidikan Politik. Program dan kegiatan pendidikan politik ini diantaranya penyuluhan kepada masyarakat, koordinasi forum-forum diskusi politik, penyusunan data base partai politik, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Melihat dinamika yang terjadi belakangan ini generasi muda masih banyak sekali yang tidak melek dengan politik, ataupun apatis terhadap kehidupan politik yang terjadi. Kehidupan generasi muda yang demikian merupakan dampak dari kurangnya pendidikan politik dalam mengajak para generasi muda ini untuk turun serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik yang ada.

Generasi muda sebagai tonggak masa depan bangsa yang memiliki peranan yang besar untuk keberlangsungan suatu bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemuda harus memiliki wawasan dan pendidikan yang memadai dalam rangka untuk ikut serta dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa.

Selain itu, Generasi muda merupakan para pemilih pemula yang memiliki suara cukup besar dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga para pemilih pemula diharapkan mampu berkontribusi dalam kegiatan politik baik secara aktif maupun pasif.

Data yang didapat dari Kesbangpol Kota Bandung, bahwa di tahun ini ada penambahan sebesar 2.459 pemilih Pemula di Kota Bandung, data ini disiarkan dalam berita acara rekapitulasi daftar pemilih hasil PDPB Bulan April tahun 2022 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Bandung. Untuk mewujudkan pesta demokrasi yang sesuai dengan harapan, KESBANGPOL Kota Bandung disini mempunyai peranan penting melalui pendidikan politik bagi para generasi muda. Pendidikan politik yang diadakan KESBANGPOL Kota Bandung dapat diberikan melalui pendidikan pemilih (*voters education*) bagi generasi muda sebagai pemilih pemula yang memiliki jumlah sangat signifikan dalam kegiatan pemilihan.

Pendidikan bagi pemilih pemula memiliki peranan yang sangat penting dalam membangkitkan kesadaran dan daya kritis generasi muda tentang hak pilihnya, sehingga siswa memiliki pemahaman akan pelaksanaan pemilu/pilkada yang merupakan bagian dari proses demokrasi yang dilakukan dengan sepenuh hati. Dengan begitu, siapa pun yang menduduki kursi kepemimpinan adalah mereka yang benar-benar berkualitas, memiliki integritas tinggi, jujur, adil, amanah, dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Setiawaty, 2014).

Selain itu, pendidikan politik merupakan metode preventif yang cukup efektif untuk mengeliminasi konflik massa dalam kegiatan politik. Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen dan terkotak-kotak dalam beberapa kelompok menjadi pemicu munculnya konflik. Oleh karena itu, masyarakat, dalam hal ini generasi muda, diharapkan memiliki kecerdasan

politik, sehingga mereka tidak lagi menjadi objek dalam pemilu, tetapi mereka dapat menjadi subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politiknya, sekaligus menjadi pendorong pendewasaan partai politik untuk lebih memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan kepentingan perorangan atau kelompok (Susilo, 2018).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KESBANGPOL Kota Bandung tentunya memiliki beberapa hambatan. Salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang masih menyelimuti Masyarakat di tingkat Daerah sampai Dunia, tentunya hal ini menghambat kerja-kerja instansi untuk mempertahankan maupun meningkatkan angka partisipasi politik Masyarakat Kota Bandung, apalagi untuk pemilih pemula yang didominasi siswa SMA se-derajat yang selama pandemi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring di rumah.

Menurut Ketua KPU Kota Bandung ketika di wawancara, mengatakan bahwa "pemilih pemula jumlahnya besar dan itu menjadi potensi bagi para konstituen. Kita berharap mudah-mudahan masyarakat dapat mengakses jalur untuk menjadi DPT menghadapi Pemilu yang akan dilakukan serentak pada 2024 mendatang," (Riyadi, 2021).

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 berbunyi bahwa pemilih pemula merupakan warga Indonesia yang ketika hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap mencapai usia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang memiliki hak pilih, dan sebelumnya tidak termasuk pemilih disebabkan ketentuan Undang- Undang Pemilu. Pemilih pemula dalam kategori politik merupakan kelompok yang pertama kali memakai hak pilihnya (Rahman, 2018).

Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang diadakan setiap lima tahun sekali maka usia pemilih pemula terdiri dari individu yang berumur 17 sampai 21 tahun. Rata-rata kelompok pemilih ini adalah mereka yang sedang menempuh tingkat awal pendidikan tinggi, para pekerja yang baru lulus SMA atau bahkan anak SMA yang mendekati kelulusan. Pemilih pemula menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. *Pertama*, jumlah pemilih pemula dalam setiap Pemilu cukup besar. *Kedua*, mereka adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang baru pertama kalinya memberikan suara dalam Pemilu sehingga perlu diberi arahan yang baik agar memiliki pemahaman yang baik pula terhadap demokrasi.

Ketiga, mereka adalah calon pemimpin masa depan sehingga dengan menggali dan mengetahui padangan mereka tentang demokrasi, kita dapat memberikan apa yang mereka butuhkan sebagai bekal di masa depan. Maka dari itu, Pendidikan Politik terhadap para pemilih pemula ini patut diperhatikan dan di rencanakan sebaik mungkin, sehingga mereka memiliki kompetensi yang layak dalam memilih pemimpin dan tentunya mewujudkan demokrasi di Indonesia yang lebih substansial.

Pendapat selanjutnya dari Akinsolu dan Orit (2004) dalam penelitiannya mengatakan, Pendidikan politik juga dikenal sebagai sosialisasi politik (*political socialization*) atau pembelajaran politik (*political learning*) yang merupakan pengembangan sikap serta proses pembentukan perilaku politik seseorang. Pendidikan politik tidak hanya terbatas pada pengertian politik secara formal, seperti keterlibatan dalam kampanye partai politik dan memberikan suara dalam pemilihan umum atau pilkada (Istikharah & Asrinaldi, 2019).

Jadi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warganegara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

Dalam filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses panjang seumur hidup. Artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami

perkembangan. Hal ini diperlukan mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah politik. Dalam proses pendidikan politik melibatkan semua golongan, baik golongan muda hingga golongan tua.

Tujuan pendidikan politik menurut (Kartono, 1996) ialah: *Pertama*, Membuat rakyat; Mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik; Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap; Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu/ atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara; Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. *Kedua*, yaitu Memperhatikan dan mengupayakan: Peranan insani setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/ aktualisasi diri dari dimensi sosialnya); Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik); Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Menurut Rusadi Kantaprawira (2004:55), bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui: Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, maupun bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum lainnya; Siaran radio, televisi, serta film (media yang berbentuk audio-visual); Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Pendidikan Politik harus ada tentunya untuk meningkatkan partisipasi politik yang dimana Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam Miriam Budiharjo (2008:368), partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak secara individu untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi tersebut dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Arniti, 2020).

Penelitian yang berjudul "Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Bandung" mencoba untuk mengamati berbagai upaya yang dilakukan KESBANGPOL Kota Bandung dalam melaksanakan program pendidikan politiknya terkhusus bagi pemilih pemula sesuai dengan judul penelitian yang ada.

Dari Latar Belakang yang sudah diulas, Masalah dalam penelitian ini berdasarkan pencapaian partisipasi masyarakat dalam pemilu serta pilkada tahun 2018 dan 2019 yang didapatkan oleh kota Bandung yang mengalami peningkatan dari pemilu 2014. Peningkatan tersebut tentunya tidak lepas dari peran besar pemilih pemula yang antusias aktif memilih dalam kontestasi pemilu serta pilkada. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana upaya Kesbangpol sebagai salah satu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam pendidikan politik menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemilih pemula? Bagaimana pencapaian kesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk pemilih pemula?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode analisis. Menurut Creswell (1994) penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan holistic yang melibatkan suatu penemuan (Creswell, 2015). Penelitian kualitatif pun di gambarkan sebagai model evolusi yang terjadi di lingkungan alami yang memungkinkan peneliti untuk dapat mengembangkan tingkat detail dari pengalaman dalam kehidupan nyata yang menarik.

Dalam Penelitian ini peneliti akan menggunakan prosedur penelitian sebagai berikut:

1. Observasi, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan satu pengamatan, dengan catatan tentang situasi atau perilaku audiens target. Sutrisno dan Sugiyono (2014: 145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2015).
2. Wawancara, teknik pengumpulan data melalui proses menanya tanggapan verbal berjalan satu arah, yaitu pertanyaan datang dari sisi lain jawaban dan jawaban yang diberikan oleh responden. Menurut Hopkins, wawancara adalah sarana untuk mengetahui situasi beberapa dikelas dilihat dari sudut yang berbeda.
3. Dokumentasi. Metode ini dapat dipahami sebagai sarana pengumpulan data dengan cara: menggunakan data berupa buku, catatan (dokumen) seperti: dijelaskan juga oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumentasi, sumber informasi dalam bentuk tertulis atau rekaman. Dalam metode ini pengumpul data hanya boleh mentransfer dokumen teks relevan pada lembar yang telah disiapkan untuk mereka apabila diperlukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini pegawai kesbangpol di bagian jabatan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Sub Koordinator Politik Dalam negeri dan Peningkatan Demokrasi. Berikut ini adalah kedua subjek penelitian tersebut.

Tabel 1. Subjek Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Jabatan
1.	Nani Dwiyani, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
2.	Bachtiar Achmad, S.STP., M.Han	Sub Koordinator Politik Dalam Negeri dan Peningkatan Demokrasi pada Badan Kesbangpol Kota Bandung

Sumber: diolah peneliti

Upaya Kesbangpol Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para subjek penelitian, menjelaskan gambaran tentang bagaimana kedudukan Kesbangpol dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan Kesbangpol dalam Peraturan Walikota Kota Bandung No 23 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesbangpol Kota Bandung adalah sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta berkedudukan langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Berikut merupakan beberapa upaya pendidikan politik oleh Kesbangpol Kota Bandung:

Tabel 2. Program Pendidikan Politik Kesbangpol Kota Bandung

Tahun 2019 (sebelum pandemi)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Melakukan pendidikan politik melalui safari/roadshow ke sekolah-sekolah	Pendidikan politik dilakukan secara terbatas karena terhambat oleh <i>refocusing</i> anggaran	Pendidikan Politik dilaksanakan ke perwakilan ibu-ibu PKK pada tiap kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung secara terbatas karena terhambat oleh <i>refocusing</i> anggaran	Pendidikan politik dilakukan ke Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan partai politik yang anggotanya perempuan dan rencananya pendidikan politik akan kembali dilakukan ke sekolah

Sumber: diolah peneliti

1. Tahun 2019

Menurut Subjek Penelitian I, sebelum pandemi terjadi (Tahun 2019), dalam menjalankan fungsinya kesbangpol bisa menyelenggarakan proses pendidikan politik secara maksimal dengan tatap muka langsung dengan para peserta. Pendidikan Politik Untuk pemilih pemula dilaksanakan melalui program safari/rodashow ke sekolah-sekolah. Penyuluhan yang dilakukan bertujuan agar para peserta didik SMA yang rata-rata berumur dari 17-19 Tahun yang merupakan usia dari pemilih pemula ini dilaksanakan dengan bertujuan agar para pemilih pemula dapat mecoblos dengan baik dalam pemilu maupun pilpres yang dilaksanakan pada tahun 2019. Selain itu, Subjek Penelitian II mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya penyuluhan ini adalah untuk menghindari penyebaran berita hoax atau berita palsu yang pada tahun 2019 cukup sering terjadi. Apalagi pemilih pemula merupakan salah satu kelompok yang rawan digiring opini atau berita palsu yang bisa membahayakan keamanan dan kondusivitas masyarakat.

2. Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara, subjek penelitian mengatakan bahwa efektifitas kesbangpol dalam penyelenggaraan pendidikan politik terganggu oleh adanya pandemi. Subjek Penelitian I mengungkapkan bahwa segala program yang sudah direncanakan kesbangpol terhambat oleh adanya re-focusing atau pengalihan anggaran yang seluruhnya di fokuskan untuk penanganan covid-19 sehingga Kesbangpol dalam melaksanakan pendidikan politik sesuai dengan tugas dan fungsinya belum efektif. Subjek penelitian II menjabarkan bahwa di masa pandemi, target sosialisasi dari kesbangpol khususnya pemilih pemula yang didominasi para pelajar yang berusia 17-20 Tahun melakukan pembelajaran di rumah secara daring, sehingga sosialisasi roadshow ke sekolah sebagai program utam kesbangpol dalam melaksanakan pendidikan politik belum bisa terlaksana. Selain itu, dikarenakan adanya re-focusing anggaran sehingga kesbangpol menyusun skala prioritas dalam penyusunan program dan pendidikan politik untuk pemilih pemula belum dirasa memiliki urgensi dalam kurun waktu 2020-2021, sehingga kesbangpol fokus kepada target pendidikan politik kepada partai politik, kelompok wanita dan lapisan masyarakat lainnya yang dirasa memiliki urgensi yang lebih.

3. Tahun 2021

Menurut Subjek Penelitian II, Pelaksanaan pendidikan politik di Tahun 2021, selalu berkordinasi dengan KPU Kota Bandung sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada. Kesbangpol sendiri belum bisa maksimal dalam melaksanakan pendidikan politik, sehingga hanya bisa menyelenggarakan secara terbatas saja. Selain masih dilanda pandemi Covid-19, refocusing anggaran juga masih terjadi di tahun 2021, sehingga anggaran untuk melaksanakan pendidikan politik masih minim dan belum optimal. Sehingga kegiatan kesbangpol khususnya pendidikan politik memprioritaskan kepada kelompok atau organisasi masyarakat lain, diluar pemilih pemula.

Tabel 3. Anggaran

Belanja Modal	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019(Rp)
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	368.800.000,00

Sumber: diolah peneliti

4. Tahun 2022

Tahun 2022, agenda yang akan direncanakan kesbangpol mulai memprioritaskan pemilih pemula dalam penyelenggaraan pendidikan politik, program yang akan dilaksanakannya antara lain melaksanakan kembali roadshow ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan penyuluhan kepada pemilih pemula. Selanjutnya melaksanakan pendidikan politik untuk pemilih pemula kepada komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung. Menurut subjek penelitian II sudah dilaksanakan beberapa program pendidikan politik selain kepada pemilih pemula, seperti pendidikan politik untuk organisasi keperempuanan yang dilaksanakan awal tahun 2022. Dengan muatan materi "Partisipasi Perempuan" yang disampaikan Prof. Karim Suryadi, selanjutnya ada materi dari ketua KPU Kota Bandung yaitu Ibu Suharti, ST. dengan materi "Peran dan Posisi dalam Pemilu dan Pemilihan". Pendidikan politik untuk organisasi keperempuanan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam percaturan politik di Indonesia, terkhusus Kota Bandung. Hal ini didasari oleh berbagai peraturan perundang-undangan tentang partisipasi perempuan dalam politik, seperti UU Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang didalamnya mewajibkan keterwakilan perempuan sebesar 30% di parlemen. Selain itu, Menurut Subjek Penelitian Pendidikan Politik untuk kaum perempuan juga dilaksanakan dengan tujuan agar perempuan terkhusus ibu rumah tangga bisa melaksanakan pendidikan politik dalam lingkup keluarga

Pembahasan

Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik, upaya yang bisa dilakukan oleh Kesbangpol Kota Bandung adalah melaksanakan berbagai bentuk pendidikan politik. bentuk-bentuk pendidikan politik menurut Kantaprawira (2004) dapat dilakukan melalui: Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, maupun bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum lainnya, Siaran radio, televisi, serta film (media yang berbentuk audio-visual), Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal. Subjek Penelitian II mengatakan dalam wawancara bahwa Kesbangpol sendiri memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pendidikan politik dan peningkatan demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun sifatnya tugasnya melaksanakan hanya sebagai unsur penunjang pemerintahan bukan sebagai badan khusus, seperti Komisi Pemilihan Umum yang memang bertugas khusus dalam menjalankan segala urusan terkait dengan pendidikan politik.

Dalam melaksanakan bentuk pendidikan politik, jika diimplikasikan dengan pendapat dari Kantaprawira (2004), kesbangpol merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan politik melalui berbagai sosialisasi-sosialisasi yang diselenggarakan. Khususnya untuk penyelenggaraan pendidikan politik untuk pemilih pemula, Subjek Penelitian I mengatakan bahwa Kesbangpol Kota Bandung memiliki program Road Show ke sekolah-sekolah SMA di Kota Bandung, sebelum pandemi kesbangpol melaksanakan road show ke sekolah dengan bekerjasama dengan stakeholder.

Jika merujuk Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20, mengatakan bahwa pemilih pemula merupakan warga Indonesia yang ketika hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap mencapai usia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang memiliki hak pilih, dan sebelumnya tidak termasuk pemilih disebabkan ketentuan Undang- Undang Pemilu. Subjek penelitian II menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan program pendidikan politik, Kesbangpol perlu menyusun skala prioritas sehingga jika melihat waktu yang tepat dilaksanakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yang berusia 17-20 tahun adalah para pelajar Sekolah Menengah Atas.

Tetapi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, Subjek Penelitian I dan II mengungkapkan bahwa akibat kondisi dunia yang dilanda pandemi Covid-19, sehingga dalam melaksanakan pendidikan politik, Kesbangpol terhambat dalam melaksanakan berbagai program pendidikan politik. Bentuk pendidikan politik yang dilakukan untuk para pemilih pemula seperti sosialisasi pemilu maupun sosialisasi lainnya terhambat karena hampir seluruh pelajar melakukan pembelajaran secara daring atau belajar di rumah. Selain itu, hasil wawancara dengan Subjek Penelitian II juga menjelaskan jika pendidikan politik untuk pemilih pemula jika merujuk kepada pemilu 2024, baru dilaksanakan pada tahun 2022-2023. Sehingga menurutnya pendidikan politik bagi pemilih pemula belum menjadi prioritas dari Kesbangpol dalam kurun waktu tahun 2020-2021.

Beberapa program pendidikan politik yang menjadi prioritas kesbangpol diawal tahu yang sudah dilaksanakan, yaitu, kepada Dharma Wanita serta Pendidikan politik untuk Politik Kaukus Perempuan Indonesia dan organisasi keperempuanan yang dilaksanakan awal tahun 2022. Dengan muatan materi "Partisipasi Perempuan" yang di sampaikan Prof.Karim Suryadi, selanjutnya ada materi dari ketua KPU Kota Bandung yaitu Ibu Suharti,ST. dengan materi "Peran dan Posisi dalam Pemilu dan Pemilihan".

Pendidikan politik bagi organisasi kewanitaan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik di Indonesia, terutama di Kota Bandung. Hal ini didasari oleh peraturan perundang-undangan tentang partisipasi perempuan dalam politik, seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang didalamnya mewajibkan keikutsertaan perempuan sebesar 30%. Selain itu menurut subjek penelitian, Pendidikan Politik bagi kaum perempuan terutama ibu rumah tangga merupakan pendidikan politik dalam ruang lingkup keluarga.

Dalam Penyusunan Program pendidikan politik bagi pemilih pemula, Kesbangpol Kota Bandung melalui Sub Koordinator Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi menyusun prioritas terlebih dahulu, selanjutnya pada tahap perencanaan program disesuaikan dengan target peserta yang mengikuti sosialisasi dari kesbangpol sendiri. Subjek Penelitian I menjelaskan bahwa sebelum pandemi, Program pendidikan politik bagi pemilih pemula dilaksanakan dengan roadshow ke sekolah untuk para pelajar, sedangkan untuk para mahasiswa dilaksanakan bentuk pendidikan politik dengan melakukan Forum Grup Discussion (FGD) politik dengan berbagai tema.

Subjek penelitian II menjelaskan bahwa di tahun 2021 sempat dilaksanakan pendidikan politik kepada para mahasiswa, salah satu materi yang disampaikan adalah Peran Mahasiswa Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Substantif, Berkualitas dan Berkeadilan. Dari studi dokumentasi yang dilakukan, materi tersebut memuat bagaimana peran dari mahasiswa serta masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam politik. Dijelaskan pula dalam materi tersebut bagaimana mahasiswa berperan penting dalam meningkatkan partisipasi bagi pemilih pemula. Kesbangpol juga di tahun 2022 sudah melaksanakan sosialisasi pemilu kepada para partai politik di Kota Bandung, yang dimana selanjutnya diharapkan para partai politik melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, salah satunya pemilih pemula. Selain itu, Kesbangpol di Tahun 2022, melaksanakan pendidikan politik untuk perempuan, melalui berbagai sosialisasi kepada organisasi perempuan. Tentunya hal ini diharapkan agar partisipasi kaum perempuan dalam politik dapat meningkat.

Subjek Penelitian II juga mengungkapkan bahwa di tahun 2022-2023 menjelang pemilu 2024, program pendidikan politik untuk pemilih pemula akan mulai digencarkan melalui berbagai bentuk baru tidak hanya terbatas pada sosialisasi formal saja. Salah satunya yang sedang direncanakan adalah mengadakan lomba essay mengenai pemilihan umum bagi pemilih pemula serta akan membuat konten di media sosial bakesbangpol kota Bandung yang khusus

menyasar pemilih pemula. Dari berbagai penjelasan yang diberikan oleh para subjek penelitian dapat ditarik implikasi dengan berbagai teori pendidikan politik, bahwa pendidikan politik yang dilakukan kesbangpol masih terbatas pada kegiatan-kegiatan formal, walaupun sudah ada rencana akan melaksanakan Pendidikan politik yang lebih edukatif yang intensional. Bentuk Program pendidikan politik kesbangpol sendiri jika mengacu pendapat dari Kantaprawira (2004), masuk salah satu kriteria lembaga yang merupakan penyelenggara pendidikan formal, sedangkan bentuk pendidikan politik menggunakan Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, maupun bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum lainnya serta Siaran radio, televisi, serta film (media yang berbentuk audio-visual) masih belum dilaksanakan dengan baik, padahal secara pembiayaan bentuk penggunaan bentuk pendidikan seperti publikasi massa dan penggunaan media lebih murah dan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kesbangpol sendiri memiliki fungsi melaksanakan pendidikan politik untuk pemilih pula di Kota Bandung. Mengukur ketercapaian program bisa dilihat dari laporan kinerja dari kesbangpol yang memiliki catatan baik, hanya saja dari studi dokumentasi yang penulis lihat kinerja kesbangpol menuai beberapa kritik dari lembaga legislatif Kota Bandung, yaitu DPRD Kota Bandung. Selanjutnya, dalam konteks ketercapaian hasil program yang berkaitan dengan pendidikan politik bagi pemilih pemula, bisa kita lihat dari ketersediaan program pendidikan politik untuk pemilih pemula, tujuannya, serta bagaimana bentuknya. Subjek Penelitian I menjelaskan Program Pendidikan Politik yang dilaksanakan kesbangpol dalam kurun 2 tahun terakhir terhambat. Ini dikarenakan adanya refocusing atau pengalihan anggaran, untuk penanganan Covid-19. Selain itu, bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan kesbangpol sendiri masih didominasi kegiatan-kegiatan formal seperti road show ke sekolah-sekolah secara rutin bulanan dan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Bandung, sehingga masih memerlukan tatap muka dan jumlah peserta yang cukup banyak. Sehingga kesbangpol sendiri kesulitan dalam melaksanakan pendidikan politik di masa pandemi.

Selanjutnya, Subjek penelitian II menjelaskan bahwa refocusing anggaran membuat produktifitas program yang biasanya dilaksanakan kesbangpol berkurang di masa pandemi. Selain itu, sebagai lembaga unsur penunjang, kerja-kerja kesbangpol juga menyesuaikan dengan arahan dari pimpinan yaitu walikota dalam melaksanakan tugasnya. Berbeda dengan lembaga yang berkecimpung langsung, seperti KPU.

KESIMPULAN

Program pendidikan politik ini tidak berjalan secara optimal dikarenakan banyaknya hambatan yang terjadi khususnya pada masa pandemi. Pelaksanaan program kerja pendidikan politik yang seharusnya berjalan pada tahun 2020-2021 tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dampak dari adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan segala rencana dan anggaran di alihkan kepada penanganan covid-19 sehingga terjadinya re-focusing anggaran. Namun rencana program Pendidikan politik bagi pemilih pemula yang seharusnya berjalan pada tahun 2022-2021 yang bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan safari ke Sekolah-sekolah SMA yang ada di kota bandung bukan lah suatu prioritas utama. Rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2022-2023 yaitu mengoptimalkan jalannya Pendidikan politik bagi para pemilih pemula dengan mulai melaksanakan safari yang tertunda pada tahun sebelumnya. Hal ini guna untuk meningkatkan partisipasi politik khusus bagi para pemilih pemula menjelang pemilu 2024.

Dalam konteks efektivitas Kesbangpol untuk menyelenggarakan Pendidikan politik bagi pemilih pemula masih belum optimal dikarenakan banyaknya hambatan. Hambatan

Kesbangpol dalam menyelenggarakan Pendidikan Politik bagi pemilih pemula ialah, dengan tidak dilakukan kegiatan yang biasa Kesbangpol lakukan kepada calon-calon pemilih pemula yang berada di sekolah karena pada taraf tahun 2020-2021 terjadinya pemotongan dana atau refofusing dana yang berdampak kepada tidak terlaksananya kegiatan yang biasa dilakukan oleh Kesbangpol. Selain itu juga kerja kesbangpol menyesuaikan dengan arahan pimpinan yaitu walikota dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran yang dapat diberikan antara lain: Bagi Instansi (Badan Kesbangpol Kota Bandung): Badan Kesbangpol Kota Bandung perlu memanfaatkan dana yang tersedia untuk tetap dapat menjalankan dan melaksanakan program pendidikan politik khususnya bagi pemilih pemula. Kesbangpol juga dapat memanfaatkan teknologi yang ada agar program dari Kesbangpol tentang pemilih pemula khususnya bagi pemilih pemula. Agar dapat tetap terlaksana tujuan dari program untuk pendidikan politik.

Bagi Masyarakat: Saran yang dapat diberikan kepada masyarakat adalah perlu mengembangkan pemahaman dan kesadaran politiknya lebih baik lagi sehingga dapat berpartisipasi dalam politik secara aktif. Bagi Peneliti: Dengan melakukan penelitian ini, semoga peneliti mendapat pengetahuan baru mengenai upaya pendidikan politik bagi pemilih pemula sehingga peneliti dapat menyusun strategi untuk meningkatkan jumlah pemilih pemula di daerah setempat. Bagi Peneliti Selanjutnya: Peneliti selanjutnya diharapkan agar mampu mengembangkan penelitian ini lebih dalam lagi, perluasan scope penelitian serta bagaimana upaya pendidikan politik Bakesbangpol selanjutnya dapat dijadikan sebagai penelitian selanjutnya. Bagi Jurusan PPKn: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk dijadikan referensi tambahan mengenai penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, F. N. (2018). PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA (STUDI DI BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK KOTA MALANG). . *Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang*.
- Arniti, N. K. (2020). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR. *JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 4 (2)* , 329-348.
- Ashariadi, I. A. (2021). PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN CIREBONPROVINSI JAWA BARAT. *Diploma thesis*.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Istikharah, & Asrinaldi. (2019). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 6, No 2*, 314-328.
- Kantaprawira, R. (2004). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Algensindo.
- Kartono, K. (1996). *Pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Pemerintahan Kota Bandung. (2013, Maret 4). *TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG*. Retrieved from JDIIH Kota Bandung: <https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/2523/detail>
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1)* , 44-51.

- Riyadi, T. (2021, November 19). *40 Persen Pemilih di Kota Bandung Adalah Milenial*. Retrieved from PRFM News: <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-133050730/40-persen-pemilih-di-kota-bandung-adalah-milenial>
- Saputra, R. (2017). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014. *JOM FISIP Vol. 4 No. 1* , 1-12.
- Setiawaty, D. (2014). Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Prognatik. *Jurnal ISLAMIC REVIEW, Volume 3, No. 1* , 117-145.
- Solehudin, M. (2019, April 18). *Tingkat Partisipasi Pemilu 2019 di Kota Bandung Capai 86 Persen*. Retrieved from Detik.com: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4515830/tingkat-partisipasi-pemilu-2019-di-kota-bandung-capai-86-persen>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabrata.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Menjaga Kedaulatan Pemilih*. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pembaruan Pemerintahan.
- Suryani, E. I. (2019). Komunikasi Politik : Asal Usul dan Konsepsi. *Jurnal Analisis Sosial Politik, Volume 5* , 34-43.
- Susilo, S. (2018, Desember 22). *Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula* . Retrieved from Prokal.co: <https://kaltim.prokal.co/read/news/348262-pendidikan-politik-bagi-pemilih-pemula.html>
- Vellayati , H., & Ikhsan. (2019). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di SMAN 1 Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darma Bakti Teuku Umar. Vol 1, No 1*, 19-27.